

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung

oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah serta desentralisasi tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena

PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah (dalam penelitian ini dilakukan pada Kota Kupang) dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Kota Kupang merupakan salah satu daerah sedang bertumbuh pesat yang akan meningkat kemandirian daerah. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Dalam kontribusinya terhadap APBD dimana semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Meskipun begitu, penting untuk diperhatikan, sumber keuangan yang berasal dari PAD memberi arti yang sangat penting pemerintah daerah Kota Kupang dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2008-2017

(dalam Rupiah)

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2008	27,891,567,905.00	32,036,713,530.94	114.86
2009	34,125,412,441.00	36,204,733,167.02	106.09
2010	41,616,836,469.00	36,828,891,454.35	88.50
2011	51,500,000,000.00	47,702,927,427.60	92.63
2012	61,379,555,364.00	66,068,087,201.64	107.64
2013	78,104,204,057.00	80,729,275,769.24	103.36
2014	100,923,871,583.00	113,032,803,506.97	112.00
2015	125,125,330,759.00	145,154,792,156.20	116.01
2016	144,455,277,759.00	165,449,023,460.93	114.53
2017	207,804,696,398.00	229,137,473,528.55	110.27

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, realisasi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Kupang, dari tahun 2008-2017 telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebagian besar perolehan pendapatan asli daerah di atas 100%. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan PAD yang diperoleh, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kupang terus mengalami trend pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Dinamika ekonomi Kota Kupang yang terus bergerak maju ini ditopang oleh iklim investasi disektor pariwisata dan ekonomi bisnis perkotaan semakin maju. Investasi disektor pariwisata ikut memberikan andil yang luar biasa dalam capaian pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Kupang setiap tahun.

Selain sektor pariwisata, iklim investasi di Kota Kupang mengalami pertumbuhan positif khususnya investasi usaha perbelanjaan yang sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja masyarakat Kota Kupang. Untuk diketahui sejak tahun 2008-2017, target PAD Dispenda Kota Kupang terus melampaui

target yakni lebih dari Rp. 27 miliar hingga awal tahun 2017 kondisi over target PAD Dispenda Kota Kupang Rp. 208 miliar. Hingga saat ini sektor pariwisata dan pusat-pusat perbelanjaan dikota masih menjadi pilot proyek Penghasilan PAD Tertinggi Pemerintah Kota Kupang.

Selain itu, adapun Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2017 dapat lihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kota Kupang
Tahun Anggaran 2008-2017

(dalam Rupiah)

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2008	72,972,238,700.00	69,077,673,757.00	94.66
2009	97,046,623,080.00	80,429,038,157.00	82.88
2010	130,901,763,465.00	113,162,588,399.00	86.45
2011	105,362,171,937.00	81,010,317,545.00	76.89
2012	83,432,904,083.00	58,249,003,021.00	69.82
2013	139,085,789,951.00	97,597,312,221.00	70.17
2014	154,451,503,447.99	122,955,020,199.00	79.61
2015	218,043,048,346.00	151,327,467,097.00	69.40
2016	261,311,690,688.00	237,590,514,500.00	90.92
2017	360,650,276,418.00	306,295,066,371.25	84.93

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Kupang

Berdasarkan data 1.2 di atas, realisasi belanja modal dari tahun ke tahun, mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kemajuan disektor-sektor tertentu misalnya pada tahun 2017 terjadi peningkatan disektor jasa, industri dan sebagainya. Tetapi pencapaian realisasi belanja modal dikatakan optimal, karena sampai akhir tahun 2017 mampu mencapai 84,93%. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk semakin mempercepat realisasi belanja modal dari pihak lembaga yang ada di NTT.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2012) sebagai penelitian replikasi dengan beberapa perbedaan yang membedakan. Pertama, periode penelitian ini menggunakan periode 10 (sepuluh) tahun, dimulai dari tahun 2008-2017. Kedua, rasio pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio desentralisasi fiskal. Ketiga, untuk mengukur pengaruh variabel intervening menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Keempat, daerah penelitiannya dilakukan pada Kota Kupang. Kelima, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening di Kota Kupang pada 10 (sepuluh) tahun terakhir. Guna menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerimaan PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kupang. Maka peneliti tertarik mengangkat judul yakni: **“Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan pada Kota Kupang?
2. Apakah Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan PAD sebagai Variabel Intervening pada Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan pada Kota Kupang.
2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak, yakni:

1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah pada Kota Kupang.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Menambah ilmu dan wawasan penulis tentang pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.